

# Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di RA Al-Bayan Karangbenda Parigi Pangandaran

Isyfi Agni Nukhbatillah<sup>1</sup>, Santi Setiawati<sup>2</sup>, Hoerudin<sup>3</sup>, Misbahudin<sup>4</sup>, Ina Nurwahidah<sup>5</sup>,  
Denisa Nurfitriani<sup>6</sup>

<sup>1</sup>STITNU Al-Farabi Pangandaran; [isyfiagni@stitnualfarabi.ac.id](mailto:isyfiagni@stitnualfarabi.ac.id)

<sup>2</sup>STITNU Al-Farabi Pangandaran; [santisetiawati@stitnualfarabi.ac.id](mailto:santisetiawati@stitnualfarabi.ac.id)

<sup>3</sup>STITNU Al-Farabi Pangandaran; [hoerudin@stitnualfarabi.ac.id](mailto:hoerudin@stitnualfarabi.ac.id)

<sup>4</sup>STITNU Al-Farabi Pangandaran; [misbahudin@stitnualfarabi.ac.id](mailto:misbahudin@stitnualfarabi.ac.id)

<sup>5</sup>STITNU Al-Farabi Pangandaran; [inanurwahidah@stitnualfarabi.ac.id](mailto:inanurwahidah@stitnualfarabi.ac.id)

<sup>6</sup>STITNU Al-Farabi Pangandaran; [denisanurfitriani@stitnualfarabi.ac.id](mailto:denisanurfitriani@stitnualfarabi.ac.id)

## Excellent :

Journal Of Islamic Studies

Vol 1 No 1, May 2024

Hal : 41-53

Received: 10 May 2024

Accepted: 25 May 2024

Published: 31 May 2024

**Publisher's Note:** Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STITNU Al-Farabi Pangandaran, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



**Copyright:** © 2023 by the authors.

Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## Abstract:

*This research aimed to describe the financing management planning, implementation of education financing management and education financing control to improve the quality of education in RA Al-Bayan Karangbenda Parigi. The method used in this research through observation, interviews and documentation. The results showed that 1) financing management planning was carried out by referring to the budget ceiling, not exceeding the budget determined by the government or financing from parents or the community, if the source of cost comes from the government then must look at the rules that have been determined by the government, if financing income comes from the community, so the financing management plan was carried out according to the principle of primary school needs to tertiary needs but within limits did not violate the rules 2) Madrasah financing implementation activities included two major activities, consisting of school financial revenues and expenditures. The financing management activities included bookkeeping or financial management activities 3) control/evaluation included the activities of checking and evaluating the plan and implementation of education funding can be carried out in accordance with the initial financing plan and its implementation.*

**Keywords:** *Implementation, Funding Management, Education*

*Quality*

## Abstrak:

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan manajemen pembiayaan, implementasi/pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan serta pengendalian pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di RA Al-Bayan Karangbenda Parigi. Metode yang dipakai pada penelitian ini melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) perencanaan manajemen pembiayaan dilakukan dengan mengacu pada plafon anggaran, tidak melebihi anggaran yang telah ditentukan oleh pemerintah maupun pembiayaan dari orang tua atau masyarakat, apabila sumber biaya berasal dari*

*pemerintah maka harus melihat aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, apabila pendapatan pembiayaan berasal dari masyarakat maka perencanaan manajemen pembiayaan dilakukan sesuai asas kebutuhan sekolah yang primer sampai kepada kebutuhan tersier tetapi dalam batas tidak melanggar aturan 2) Kegiatan pelaksanaan pembiayaan madrasah meliputi dua kegiatan besar yakni penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Kegiatan manajemen pembiayaan tersebut meliputi pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan 3) pengendalian/ evaluasi meliputi kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan pembiayaan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pembiayaan di awal dan pelaksanaanya.*

**Keywords:** *Manajemen Pembiayaan, Mutu Pendidikan*

## **Pendahuluan**

Program pendidikan anak usia dini adalah anak usia 0-6 tahun, yang merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan sangat berpengaruh pada kehidupan selanjutnya, anak usia dini juga diartikan sebagai anak pra sekolah. Program anak usia dini merupakan salah satu program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun baik laki laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama berkembang dengan optimal sesuai dengan potensii yang dimilikinya (Asy'ari et al., 2023).

Pendidikan anak usia dini (PAUD) bertujuan mengembangkan seluruh potensi anak agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai kultur, budaya, dan falsafah suatu bangsa. RA Al-Bayan Karangbenda Parigi merupakan sebuah lembaga yang dipersiapkan untuk menyediakan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan kualitas suatu negara. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak dapat terpisah dari pendidikan. Pendidikan yang bermutu dilihat dari sisi *input*, *proses*, *output* maupun *outcome*. *Input* pendidikan yang bermutu adalah guru-guru yang bermutu, peserta didik yang bermutu, kurikulum yang bermutu, fasilitas yang bermutu, dan berbagai aspek penyelenggara pendidikan yang bermutu. *Proses* pendidikan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang bermutu. *Output* pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang disyaratkan dan *outcome* pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau terserap pada dunia usaha atau dunia industri. pembiayaan pendidikan merupakan aktifitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dan tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan ayang telah ditetapkan. Pendapatan atau sumber dana

pendidikan yang diterima sekolah diperoleh dari APBN, APBD, dan masyarakat atau orang tua. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, manajemen pembiayaan pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan, dimulai dari tahapan perencanaan sampai kepada pengawasan (Suparno, n.d.).

Indonesia merupakan negara hukum dimana pendidikan memiliki standar nasional pendidikan. Standar ini dijadikan sebagai acuan dalam membentuk lembaga pendidikan yang bermutu. Salah satunya yaitu standar pembiayaan. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 dinyatakan bahwa pengelolaan dan pembiayaan pendidikan berdasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, akuntabilitas dan transparansi. Prinsip-prinsip yang disebutkan ini harus dijalankan dan harus memperoleh perhatian oleh orang-orang yang berada di lembaga pendidikan (Anwar Abidin, 2017). Hal ini bertujuan agar manajemen pembiayaan dalam suatu lembaga pendidikan yang ada dapat direalisasikan sesuai dengan Pendidikan Nasional.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan Definisi biaya menurut Supriyono biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya (cost) dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya.

Standar pembiayaan pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama satu tahun. Biaya disini meliputi biaya investasi, biaya operasional. Di Permendiknas ini diatur biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk setiap satuan pendidikan. dan juga setiap jalur pendidikannya. Baik yang jalur umum atau jalur berkebutuhan khusus, UU telah merinci berapa biaya yang harus ditanggung setiap peserta didik selama setahun agar proses belajar dapat berjalan. Permendiknas ini mengatur standar biaya non personalia. Biaya operasi nonpersonalia meliputi: biaya alat tulis sekolah (ATS), biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi atau perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya

pembinaan siswa atau ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri, dan biaya pelaporan. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Arifudin, 2021).

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di RA Al-Bayan Karangbenda Parigi. Adapun rumusan masalahnya adalah 1) bagaimana perencanaan pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di RA Al-Bayan Karangbenda Parigi 2) bagaimana pelaksanaan manajemen pembiayaan 3) bagaimana evaluasi manajemen pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di RA Al-Bayan Karangbenda Parigi?

## **Bahan dan Metode**

Penelitian ini dilaksanakan di RA Al-Bayan tepatnya di jalan Cigugur KM.03 Dusun Pasirkiara, Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran pada tanggal 29 Juni 2024. Penelitian ini berfokus pada manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata kata dan bahasa, alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode (Moleong J, 2004). Sedangkan menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2016). Adapun objek dalam penelitian ini adalah kepala RA Al-Bayan, bendahara, dan guru guru. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen yang digunakan adalah lembar observasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

## Hasil dan Diskusi

Menurut (Fattah, 2012) "proses manajemen pembiayaan sekolah adalah perencanaan pembiayaan dan penganggaran, implementasi pelaksanaan penganggaran dan pengawasan dan pengendalian dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilakukan di RA Al-Bayan Karangbenda mengenai manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan menunjukkan hasil sebagai berikut:

### 1. Perencanaan Pembiayaan dan Penganggaran

Dalam buku landasan manajemen pendidikan, menurut koonts penganggaran (*budgetting*) merupakan satu langkah perencanaan yang fundamental. Anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana operasi dari suatu kegiatan atau proyek yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk suatu periode tertentu. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengeloaan data secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah (Nanang Fattah, 2017).

Dalam penyusunan anggaran pendidikan, ada beberapa kaidah yang menjadi dasar yang tegas untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah antisipatif agar tidak terjadi penyelewengan anggaran pendidikan, maka diterapkan beberapa asas dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendidikan, antara lain; 1) asas *plafond*, bahwa anggaran belanja yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan, 2) Asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, artinya bahwa pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan, 3)Asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran (Wahyuni, 2021).

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian perencanaan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan dalam suatu lembaga pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksanakannya kegiatan- kegiatan dalam proses pelaksanaan lembaga pendidikan,

artinya setiap program yang akan di laksanakan pasti membutuhkan dan memerlukan anggaran lembaga yaitu biaya keuangan. Sehingga anggaran lembaga yaitu komponen keuangan dan pembiayaan perlu dikelola sebaik-baiknya. Agar anggaran lembaga yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya pendidikan.

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu lembaga pendidikan, dapat dikelompokkan dalam tiga sumber, yaitu:

- a. Pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik yang bersifat umum dan khusus dan diperuntukkan dalam lembaga pendidikan.
- b. Masyarakat
- c. Orang tua atau peserta didik

Pada tahap ini di rencanakan jumlah total biaya/anggaran dan sumber-sumber pendanaan pada masing-masing program yang akan dikembangkan RA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penetapan jumlah biaya/anggaran berdasarkan kondisi pendanaan RA melalui penghitungan Jenis dan banyaknya dana yang dibutuhkan, perkiraan jenis dan jumlah sumber pendanaan, aturan-aturan dari sumber pendanaan dan alokasi jenis dan sumber pendanaan untuk setiap jenis kebutuhan dana masyarakat. Pada kegiatan perencanaan manajemen pembiayaan, RA Al-Bayan Karangbenda Parigi telah melakukan sesuai dengan tahapan perencanaan yaitu dengan melihat berbagai hal seperti perencanaan manajemen pembiayaan dengan melihat dan berpedoman pada plafon dan budgeting yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut contoh rencana dan anggaran RA Al-Bayan Karangbenda Parigi 2022-2023.

**Tabel 1.** Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Ra (RAPBRA) Tahun Pelajaran 2023/2024

**RA**  
**Kecamatan**  
**Kabupaten/ Kota**

**Al-Bayan**  
**Parigi**  
**Pangandaran**

Pendapatan			Belanja		
No	Uraian	Jml (Rp)	No	Uraian	Jml (Rp)
I	Rutin dari Pemda Kab/ Kota		1	Biaya Oprasional	
	1. Belanja Pegawai			Belanja Pegawai	
	2. Belanja Barang		a. Guru		Rp 30.000.000,00

	3. Belanja Pemeliharaan		2	Belanja barang dan jasa	
	4. Belanja Lain-lain			a. ATK	Rp 2.000.000,00
II	Bantuan			b. Barang habis pakai	Rp 820.000,00
	1. Pemda Kabupaten/ Provinsi			c. Kegiatan pembelajaran	Rp 4.000.000,00
	2. BOPRA	Rp 42.000.000,00	3	Biaya Perjalanan Dinas dan rapat	Rp 2.000.000,00
III	Dana Komite		4	Biaya pemeliharaan	
	1. Iuran Orang tua			a. Sarana Prasarana	Rp 2.000.000,00
	2. Infak	Rp 46.200.000,00		b. Belanja modal perawatan dan mesin	Rp 1.000.000,00
	3. Sumbangan			c. Biaya peningkatan mutu dan guru	Rp 5.000.000,00
	4. Usaha Lain			d. Biaya pengembangan kurikulum dan pembelajaran	Rp 10.000.000,00
IV	Penerimaan lain-lain			e. Administrasi dan manajemen RA	Rp 1.500.000,00
	1. Donatur			f. Organisasi dan kelembagaan	Rp 1.380.000,00
	2. Usaha Madrasah			g. Pembiayaan	
	3. Penerimaan Siswa Baru	Rp 28.510.000,00		H. Kebutuhan Peserta didik	Rp 57.010.000,00
				I. Peran serta masyarakat	
				h. Lingkungan dan budaya RA	
	Jumlah Pendapatan	Rp 116.710.000,00		Jumlah Belanja	Rp 116.710.000,00

(Sumber: Data RA Al-Bayan, 2023)

Dari tabel tersebut terlihat hasil bahwa perencanaan yang dilakukan oleh RA Al-Bayan Karangbenda Parigi dilakukan mengacu pada sumber pendapatan yang diperoleh dari pemerintah, orang tua maupun masyarakat, dari tabel terlihat bahwa rencana kerja dan anggaran mengikuti pedoman aturan pembiayaan pendidikan untuk meliputi biaya operasional dan biaya tetap madrasah, semua hal tersebut diatas terkait dengan perencanaan pembiayaan inilah yang dapat menjadi salah satu cara meningkatkan mutu pendidikan.

## **2. Implementasi Manajemen Pembiayaan**

Dalam sosialisasi kebijakan tentang Pembinaan dan Peningkatan Mutu RA pada Rapat Koordinasi Pengembangan Kurikulum RA, tanggal 14-16 November 2007, di Cisarua Bogor, Dirjen Pendidikan Islam (Prof. Dr. Moh. Ali, M.Pd., MA), menyatakan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh RA baik yang bersifat internal maupun eksternal (Tanfid, 2022).

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Dirjen Pendidikan Islam menetapkan tiga indikator mutu Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan, yaitu: (1) tercapainya dan/atau terlampaunya Standar Nasional; Siswa RA harus dapat berprestasi pada satuan pendidikan dengan predikat minimal baik sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang unggul/favorit; (2) Kompetitif; Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan RA harus dapat berkompetisi dengan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan sekolah; dan (3) dapat memenuhi harapan stakeholders; dapat memenuhi harapan dan kebutuhan orangtua, masyarakat, pemerintah, dan sebagainya (Lalupanda, 2019).

Di samping itu, Bapak Dirjen Pendidikan Islam juga mengambil kebijakan kebijakan sebagai berikut:

- a. Mengutamakan kualitas, bukan jumlah; diharapkan RA dapat mengejar berbagai ketertinggalan, terutama masalah mutu Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan.
- b. Mengutamakan keberpihakan pada swasta; mengingat bahwa RA swasta mencapai 91,4% yang harus mendapatkan perhatian lebih serius karena keberadaannya rata-rata dari segala aspek di bawah RA negeri dan sekaligus di bawah standar nasional minimal.
- c. Mengutamakan keberpihakan pada yang lemah; mengingat bahwa input calon siswa RA rata-rata dari keluarga kurang mampu.
- d. Mengutamakan keberpihakan pada pelaku utama pendidikan; dalam hal ini adalah peningkatan mutu guru, kepala RA, dan pengawas serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah

perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan selesai dan disetujui oleh semua komponen yang terlibat, dan menghasilkan sebuah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), tahapan manajemen selanjutnya yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan.

Kegiatan pelaksanaan pembiayaan madrasah meliputi dua kegiatan besar yakni penerimaan dan pengeluaran keuangan madrasah/sekolah. Kegiatan kedua dari manajemen pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Hal-hal yang perlu dibukukan dalam keuangan sekolah adalah menyangkut penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dari sumber sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Kegiatan yang dilakukan berupa :

- a. Penerimaan Biaya Pendidikan
- b. Pengeluaran Biaya Pendidikan.

**Tabel 2. LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN (LKT) RA AL-BAYAN TAHUN  
PELAJARAN 2023/2024**

RA Al-Bayan  
Kecamatan Parigi  
Kabupaten/ Kota Pangandaran

Pendapatan			Belanja		
No	Uraian	Jml (Rp)	No	Uraian	Jml (Rp)
I	Rutin dari Pemda Kab/ Kota		1	Biaya Oprasional	
	1. Belanja Pegawai			Belanja Pegawai	
	2. Belanja Barang		a. Guru	Rp 31.320.000,00	
	3. Belanja Pemeliharaan		2	Belanja barang dan jasa	
	4. Belanja Lain- lain		a. ATK	Rp 2.000.000,00	
II	Bantuan		b. Barang habis pakai	Rp 1.000.000,00	
	1. Pemda Kabupaten/ Provinsi		c. Kegiatan pembelajaran	Rp 4.000.000,00	

	2. BOPRA	Rp 42.000.000,00	3	Biaya Perjalanan Dinas dan rapat	Rp 2.500.000,00
III	Dana Komite		4	Biaya pemeliharaan	
	1. Iuran Orang tua			a. Sarana Prasarana	Rp 10.000.000,00
	2. Infaq	Rp 46.200.000,00		b. Belanja modal perawatan dan mesin	Rp 1.000.000,00
	3. Sumbangan	Rp 10.000.000,00		c. Biaya peningkatan mutu dan guru	Rp 5.000.000,00
	4. Usaha Lain			d. Biaya pengembangan kurikulum dan pembelajaran	Rp 10.000.000,00
IV	Penerimaan lain-lain			e. Administrasi dan manajemen RA	Rp 1.500.000,00
	1. Donatur			f. Organisasi dan kelembagaan	Rp 1.380.000,00
	2. Usaha Madrasah			g. Pembiayaan	
	3. Penerimaan Siswa Baru	Rp 28.510.000,00		H. Kebutuhan Peserta didik	Rp 57.010.000,00
	04.00			I. Peran serta masyarakat	
				h. Lingkungan dan budaya RA	
	Jumlah Pendapatan	Rp 126.710.000,00		Jumlah Belanja	Rp 126.710.000,00

(Sumber: Data RA Al-Bayan, 2024)

Kegiatan pelaksanaan pembiayaan madrasah meliputi dua kegiatan besar yakni penerimaan dan pengeluaran keuangan madrasah/sekolah. Dari tabel tersebut terlihat pelaksanaan pembiayaan biaya rutin, seperti gaji guru, pegawai dalam lembaga pendidikan, biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas, alat-alat pengajaran, biaya pembangunan gedung, dan lain sebagainya. Selanjutnya lembaga membuat laporan keuangan yang ditujukan kepada pemerintah maupun masyarakat. Pelaporan keuangan kepada pemerintah dilakukan sesuai dengan aturan pemerintah dan pedoman dalam kajian pelaporan keuangan, sedangkan pelaporan keuangan kepada dimasyarakat dan orang tua dilakukan setiap setahun sekali sebagai usaha menjadi lembaga yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan lembaga.

### 3. Pengendalian dan Evaluasi pembiayaan

Evaluasi pendidikan juga diartikan dengan proses untuk memberikan kualitas yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, yang mana proses tersebut berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, terencana, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Proses melakukan evaluasi mungkin saja berbeda sesuai persepsi

teori yang dianut, ada bermacam-macam cara. Namun evaluasi harus memasukkan ketentuan dan tindakan sejalan dengan fungsi evaluasi, yaitu: a. Memfokuskan evaluasi, b. Mendesain evaluasi, c. Mengumpulkan informasi, d. Menganalisis informasi, d. Melaporkan hasil evaluasi, e. Mengelola evaluasi dan mengevaluasi evaluasi.

Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk mengukur dari melihat hasil rencana yang dicanangkan pada planning. Memberikan imbalan kepada staff sesuai kinerja yang ditunjukkan, dan merancang serta merencanakan kembali sambil memperbaiki hal hal yang belum sempurna. Evaluasi pada administrasi berarti kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat bantu tertentu dalam usaha mencapai tujuan. Mengamati tingkat efektivitas maksudnya menilai tindakan tindakan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, apakah telah menghasilkan sesuatu seperti direncanakan atau sekurang- kurangnya, apakah kegiatan itu telah berjalan di atas rel yang sebenarnya dan tidak menyimpang dari perencanaan atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedang mengamati tingkat efisiensi maksudnya menilai tindakan/ kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan itu apakah merupakan cara yang terbaik atau paling tidak untuk mencapai hasil yang sebesar besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya, yang berarti apakah cara kerja tertentu yang sudah dipergunakan mampu memberi hasil yang maksimal .

Kegiatan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memgetahui capain capaian yang direncanakan pada saat merencanakan dan pada saat laporan dibuat, evaluasi akan menunjukkan bahwa seandaianya rencana anggraan yang dibuat tetapi belum bisa terlaksana maka akan di cari inti permasalahan tersebut sehingga harapanya bahwa belum terlaksananya kegiatan dan pembiayaan tersebut jelas dan menemukan solusi.

## **Kesimpulan**

Implementasi manajemen pembiayaan menjadi bagian penting manajemen pengelolaan lembaga. Dalam melakukan pengelolaan yang baik harus didukung dengan manajemen dan tata kelola sesuatu aturan perundang undangan, diantaranya manajemen pembiayaan pendidikan seyogyanya disusun dengan berbagai strategi agar tepat sasaran.

Perencanaan manajemen pembiayaan harus melihat dan berkaca pada plafon anggaran, sumber anggaran dari pemerintah orang tua atau masyarakat, perencanaan yang baik akan berdampak pada mutu pendidikan baik dalam segi pembelajaran, tenaga pendidikan dan kependidikan maupun pengelolaan pada umumnya. Implementasi manajemen pembiayaan berbicara tentang sumber pendapatan dan belanja keuangan lembaga, pelaksanaan ini menjadi bagian penting dari praktik manajemen pembiayaan, sebab dengan melaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan melakukan pelaporan secara akuntabel dan transparan maka lembaga pendidikan akan dapat berjalan sehat dan akan membawa peningkatan mutu lembaga. Selanjutnya tahapan ketiga dalam manajemen pembiayaan adalah evaluasi, setiap program sekolah harus dilakukan evaluasi bersama agar dapat diukur dan dikoreksi pada tahap pelaksanaan yang telah terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat oleh lembaga. Program-program lembaga akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan bilamana seluruh komponen lembaga ikut terlibat aktif dalam pelaksanaannya, manajemen pembiayaan yang baik dan tepat sasaran menjadi salah satu media untuk meningkatkan mutu pendidikan.

## Referensi

- Anwar Abidin, A. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi Dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah di Surabaya). *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 87. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.95>
- Arifudin. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Widina Bakti Persada.
- Asy'ari, H., Maftuhah, M., Zahruddin, Z., Taufiqurrahman, T., Yuniarti, D., Silviani, A., & Nada, R. (2023). Penyuluhan Dan Pendampingan Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 310. <https://doi.org/10.32529/tano.v6i2.2650>
- Fattah, N. (2012). *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Remaja Rosda Karya.
- J, M. L. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Lalupanda, E. M. (2019). Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan. *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 3(2), 56–62. <https://doi.org/10.17977/um025v3i22019p056>
- Nanang Fattah. (2017). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Remaja Rosda Karya.

*Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di RA Al-Bayan Karangbenda Parigi Pangandaran*

*Isyfi Agni Nukhbattillah<sup>1</sup>, Santi Setiawati<sup>2</sup>, Hoerudin<sup>3</sup>, Misbahudin<sup>4</sup>, Ina Nurwahidah<sup>5</sup>, Denisa Nurfitriani<sup>6n</sup>*

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suparno, E. W. (n.d.). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Ardadizya Jaya.

Tanfid, N. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Anak Usia Dini Di Paud Ndasari Budi Krupyak Yogyakarta. *Al Athfal: Jurnal Kajian Perkembangan Anak Dan Manajemen Pendidikan Usia Dini*, 5(1), 17–32. [https://doi.org/10.52484/al\\_athfal.v5i1.287](https://doi.org/10.52484/al_athfal.v5i1.287)

Wahyuni, E. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. UNESA Press.